



# RENCANA KERJA (RENJA)



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021**



# **R E N J A**

**RENCANA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,  
  
IRA PUSPITASARI, SH, M.Ec.Dev  
Pembina  
NIP. 19800417 200604 2 015

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 ini telah selesai disusun.

Rencana Kerja (RENJA) disusun berdasarkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021. Buku ini berisi rencana prioritas program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, dengan mengacu pada indicator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD dan hasil evaluasi dan analisis kinerja OPD serta hasil Forum OPD tahun 2020.

Dalam penyusunan rencana kerja ini seluruh pemangku kepentingan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen telah dilibatkan, sehingga dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan komitmen dari seluruh aparatur dinas dalam rangka memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas kepada masyarakat di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Kami menyadari Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen masih jauh dari sempurna dan belum memenuhi harapan semua pihak, oleh karena itu saran dan masukan kami harapkan guna perbaikan penyusunan Rencana Kerja OPD di tahun yang akan datang.

Semoga Buku Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai pedoman dan arah dalam pengembangan serta upaya untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 30 Juli 2020

KEPALA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KEBUMEN



**WIDIATMOKO, SH, MH**  
Penyelia Utama Muda  
NIP.19681128 199603 1 006

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2019 dan capaian Renstra .....	11
II.2. Kajian Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
II.3. Isu Isu Penting / Strategis Penyelenggaraan Tupoksi .....	24
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten kebumen .....	28
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .....	34
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
III.1. Telaahan Terhadap Arah Kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional .....	35
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah .....	36
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN	42
BAB V. PENUTUP	51

## DAFTAR TABEL

No	Tabel	Halaman
2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kebumen .....	15
2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen .....	23
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 Kabupaten Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen .....	29
3.1	Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan kabupaten kebumen Tahun 2021 .....	36
3.2.	Program, kegiatan dan Subkegiatan Dinas perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 .....	39
4.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2021 dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten kebumen .....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Uraian
1.	Rab Print Out Simper.....
2.	Usulan Banprop bankeu .....
3.	Usulan DAK print out sipdd Jateng.....
4.	Usulan APBN Non dak Print Out Krisna selaras .....
5.	BA forum OPD dan lampiran .....
6.	Daftar hadir Forum OPD .....
7.	Notulen Rapat Forum OPD .....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, setiap organisasi publik saat ini lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggung jawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Setelah menganalisis perkembangan lingkungan strategis dengan memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta dengan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi. Selanjutnya ditentukan strategi untuk mencapai tujuan dengan merencanakan program yang akan dipergunakan sebagai acuan rencana kerja kebijakan pembangunan daerah secara umum yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan skala prioritas yang penting dan mendesak, sehingga dapat menjadi pendorong utama pembangunan guna tercapainya pembangunan ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan dan menciptakan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi secara menyeluruh.

Rencana Kerja Tahun 2021 mencerminkan rencana Program, Kegiatan dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021. Dokumen ini juga memuat indicator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan dan lokasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang didasarkan pada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah tahun Anggaran 2021.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 yang diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 yang telah tersusun dengan baik secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan .

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

Sedangkan tugas pokok yang diamanatkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Manfaat pembangunan industri dan perdagangan secara langsung bagi daerah adalah peningkatan jumlah tenaga kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan secara tidak langsung yaitu pemanfaatan potensi pasar domestik dan ekspor, peningkatan kemampuan pertumbuhan industri daerah.

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
3. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang perindustrian dan perdagangan;
4. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
5. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang perindustrian dan perdagangan;
6. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutahiran data dan pemberian informasi di bidang perindustrian dan perdagangan;
7. pelaksanaan pendataan, penetapan, perencanaan, penerimaan, penagihan, intensifikasi, ekstensifikasi pemungungutan dan penerimaan retribusi pasar daerah serta pendapatan lain-lain sesuai dengan kebijakan yang telah di ditetapkan oleh Bupati;
8. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah dan swasta;
9. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi dan tata laksana dan perlengkapan; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, Rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, untuk menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan

rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 antara lain :

1. Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di daerah sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh *stakeholders*. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu *stakeholder* kunci di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021.

## I.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021, landasan hukum yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
8. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang - Undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
24. Rencana strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2016-2021.

### I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan dan menyelaraskan prioritas program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja ini juga dimaksudkan untuk melakukan upaya sinkronisasi terhadap program-program provinsi dan nasional dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2021. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah yang dirumuskan melalui program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen selama satu tahun anggaran, Tahun anggaran 2021. Untuk mengidentifikasi efektivitas berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut, hasil/keluaran penyusunan rencana kerja ini menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Kebumen pada tahun 2021. Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu ditetapkan program tahunan, sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini.

#### I.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 berpedoman pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I . PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

#### I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

#### I.3. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

#### I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isidokumen.

### BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

#### II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Memuat kajian/review terhadap Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2018) berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKJIP, Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2019), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

#### II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, dan/atau Indikator Kinerja Kunci (diambil dari

IKU Daerah dan IKU OPD) Capaian kinerja urusan yang diampu oleh OPD (opsional bagi OPD yang memiliki kinerja urusan dengan mengambil data pada Narasi Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 bahan musrenbangkab)

### II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan SDGs, Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### II.4. Review Usulan Program dan Kegiatan PD

Berisikan uraian mengenai Perbandingan antara rancangan awal RKPD (print out Simper terakhir) dengan hasil analisis kebutuhan (Renstra), Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

### II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan parapemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanankabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan, dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada PD Kabupaten (diambil dari hasil Musrenbangcam, Kuota Kecamatan, dan Pokir DPRD)

## BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD

### III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

### III.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

### III.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang

menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: { Pencapaian visi dan misi kepala daerah (Pencapaian IKU Daerah), Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pencapaian IKU OPD, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan kewilayahan}, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu), Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya, Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini

#### BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN LALU

#### II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja PD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis PD. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja.

Pengukuran laporan kinerja ini diperlukan indikator Input (masukan) Output (Keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. indikator Masukan (Input), yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia , maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. indikator keluaran (Output), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik fisik maupun non fisik.
3. indikator hasil (Outcome), yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan input sebaiknya untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, Seberapa besar output akan menghasilkan outcome dinamakan efektif.

Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efisien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena output merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan. namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian/penilaian.

## 1. Analisis Kinerja Output

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2019 melaksanakan 14 (Empat belas) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan yang telah dicanangkan pada tahun 2019 dan telah dilaksanakan dengan baik serta telah memberikan laporan akhir kinerja pada masing-masing kegiatan. Berdasarkan data-data yang ada, menunjukkan kinerja keluaran yang baik, yaitu capaian kerjanya 87,77 % jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam DPA kegiatan. Artinya, hampir seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mampu melaksanakan dan merealisasikan indikator kinerja dengan baik.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dari kegiatan, bahwa semua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah berusaha maksimal dan telah berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan di awal tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen telah bekerja dengan keras dan bersungguh-sungguh dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Kebumen.

## 2. Analisa Kinerja Keuangan

Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efisiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program.

Pada Tahun 2019, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen melaksanakan 14 (Empatbelas) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- d. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan;
- e. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
- f. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
- g. Program Pengembangan Data/Informasi
- h. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri;
- k. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan;
- l. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- m. Program Penataan Struktur Industri;
- n. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

Berdasarkan realisasi keuangan Belanja Langsung hasil dari pelaksanaan 14 (empatbelas) program yang dijabarkan dalam 41 (empat puluh satu) kegiatan telah melaporkan capaian kinerja keuangan sebesar 85,97 % (Delapan Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Tujuh Persen) dari Total Belanja Langsung yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 33.689.658.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp 28.962.474.757,00 (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 merupakan rencana program, kegiatan dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2021 menguraikan target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2021. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai pada Tahun 2021 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan.

Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja.

Sasaran dan kegiatan tahunan yang ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah atau instansi/lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dari analisa pencapaian kinerja pelayanan pada Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan capaian kerjanya dengan cukup baik. Untuk rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019  
Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kebumen

kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah tahun 2021	RealisasiTarget kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-3)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-3)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>									
	<b>Lingkungan Hidup</b>									
	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>									
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	2,120	653,99	300	298,16	99.39	348	1300.15	0.61
	<b>Statistik</b>									
	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>									
	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya data statistik perindag	135	22,44	35	34,12	97.49	24.75	81.31	0.60
	<b>Urusan Pilihan</b>									
	<b>Perdagangan</b>									
	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>									

			Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan permasalahan konsumen	40	37,01	-	-	-	37.01	0.93	
			Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terlaksanannya Pengawasan dan Peredaran Barang dan Jasa	293,3	49,99	95	94,81	99.80	315.78	460.58	1.57
			Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	Terlaksanannya Pengawasan Tera ulang dan Kemetrolagian	2,026	51,28	599	594,45	99.24	3.927.13	645.73	0.32
			Pengumpulan informasi pita cukai ilegal atau tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)	Terlaksanannya pengawasan peredaran pita cukai palsu atau tidak dilekati pitacukai	270	79,24	50	49,99	99.98	50	179.23	0.66
			<b>Program peningkatan dan pengembangan ekspor</b>									
			Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Terlaksanannya pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	610	60	100	99,95	99.95	495.1	655.05	1.07
			Membangun jejaring dengan eksportir	Terbangunnya jejaring dengan eksportir	930	79,64	150	149,88	99.92	-	229.52	0.25
			<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>									
			Fasilitasi kemudahan	Terfasilitasi pengurusan dokumen	650	-	60	59,93	99.88	-	59.93	0.09

			perijinan pengembangan usaha	ekspor bagi UMKM								
			Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Tercukupinya data informasi kebutuhan bahan pokok masyarakat dan pengawasan barang bersubsidi	800	69,97	75	74,93	99.91	170.72	315.62	0.39
			Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Terpenuhinya upah tenaga kerja kebersihan keamanan, pengelolaan sampah, operator pengelolaan sampah, entry data pasar dan parkir pasar pasar daerah	12328,2	2210,76	2592,72	2274,41	87.72	1929.662	1934147.17	156.89
			Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Terlaksananya pameran inacraf, Kebumen Expo, dan Pengelolaan griya Pamen	1069,8	717,41	200	199,99	100.00	346.57	546.56	0.51
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar - pasar Daerah	Terwujudnya pasar daerah yang aman dan nyaman (pasar Hewan Argopeni, Jogosimo dan Pasar Puring Tahap II); Pengadaan blower dan kipas angin untuk 35 Pasar Daerah; Penyusunan Kajian Pengembangan Pasar Tumenggungan	217432	29268,6	22,675	18749,6	82.69	12150.44	717.41	0.00
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar - pasar Daerah	Terwujudnya pasar pasar daerah yang aman dan nyaman (Pasar Kritig	-	-	-	-	-	-	-	-

				Petanahan)									
				Pengembangan pengelolaan gudang dengan Sistem Resi Gudang	Terlaksanannya Operasionalisasi sistem resi gudang di kabupaten kebumen	1,584	125,15	200	197,34	98.67	2797	3119.49	1.97
				<b>Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan</b>									
				Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Terfasilitasinya PKL dan Pembinaan PKL	955,6	141,13	100	94,39	94.39	757	992.52	1.04
				Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Terfasilitasinya PKL dan penyuluhan PKL dan asongan	1,260	-	245	236,28	96.44		236.28	0.19
				Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Terfasilitasinya Tempat PKL dan asongan	1,260	-	200	7,43	3.72	351.5	358.93	0.28
				Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	Terfasilitasinya Pengawasan PKL dan asongan	1,360	-	320	288,59	90.18		288.59	0.21
				<b>Perindustrian</b>									
				<b>Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi</b>									
				Pengembangan kapasitas pranata pengukuran,	Terwujudnya peningkatan dan terselenggaranya	3,426	42,07	50	48,49	96.98	537.48	628.04	0.18

			standarisasi, pengujian dan kualitas	sertifikasi hak Merk								
			Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Terwujudnya peningkatan dan terselenggaranya sertifikasi hak Merk	-	-	-	-				
			<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>									
			Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Terlaksananya bantuan alat bagi IKM	3,820	642,5	343,99	340,85	99.09	818	1801.35	0.47
			Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Terlaksananya bantuan alat dan pelatihan bagi IKM; Pelatihan Ketrampilan Anyaman Pandan (Karanggayam, Penimbun, dan Clapar); Pelatihan ketrampilan dengan bahan baku Jenitri (2 desa yaitu : Karanggayam dan Karangtengah); Pelatihan pengolahan dan kemasan gadung (Ds Karangtengah); Pelatihan Batik (Desa Penimbun); Pelatihan pembuatan Krupuk pangsit dan kripik pisang (Desa Clapar); Pelatihan pembuatan	1752,5	460,49	940	889,45	94.62	606	1955.94	1.12

				Oyek Aneka Rasa (Desa Logandu)								
			Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Terciptanya izin PIRT bagi IKM, MD dan sertifikasi (200 IKM PIRT; 20 IKM Halal dan 1 IKM Merek Dagang)	926,51	115,54	200	195,52	97.76	-	311.06	0.34
			Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT (DBHCHT)	Terlaksananya bantuan alat dan pelatihan bagi IKM ( 1kelompok bantuan alat dan 9 Pelatihan/magang IKM)	2,550	726,47	550	538,84	97.97	580	1845.31	0.72
			<b>Program peningkatan kemampuan teknologi industri</b>									
			Pengembangan dan pelayanan teknologi industri		-	-	-	-				
			<b>Program penataan struktur industri</b>									
			Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Tersusunnya dokumen Rencana Induk Industri Daerah Kabupaten Kebumen	-	-	-	-				
			Penyusunan Rencana Induk Industri Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Industri Daerah Kabupaten Kebumen	660	288,04	88,75	85,94	96.83	49.5	423.48	0.64
			<b>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>									

			Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat		-	-	-	-				
			<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>									
			<b>Perencanaan Pembangunan</b>									
			<b>Program pengembangan data/informasi</b>									
			Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renja RKA, DPA LAKIP, LKPJ, LPPD	277	78,98	66	64,37	97.53	69.47	212.82	0.77
			<b>Keuangan</b>									
			<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>									
			Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Tercapainya target pendapatan daerah	2,522	245,59	333,7	301,98	90.49	1044.77	1592.34	0.63
			Fasilitasi peningkatan PAD		575	46,3	100	97,15	97.15	-	143.45	0.25
			<b>Fungsi Lainnya</b>									
			<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>									
			Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasinya peraturan perundang undangan	150	71,27	202,38	84,12	41.57	118.8	274.19	1.83
			<b>Program Pendukung Operasional SKPD</b>									
			<b>Program Pendukung</b>									

			<b>Operasional SKPD</b>									
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
			Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan surat menyurat	28,4	9,4	39,73	6,16	15.50	4.25	19.81	0.70
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya biaya kantor untuk listrik, air dan telepon	3,267	712,38	462	357,02	77.28	371.32	1440.72	0.44
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan BBM kendaraan Dinas	953,5	279,28	157,1	136,87	87.12	159.9	576.05	0.60
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya penatausahaan keuangan SKPD	667,3	182,16	102,3	102,28	99.98	176.354	176638.44	264.71
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	TERPENUHINYA JASA KEBERSIHAN KANTOR	54,7	6,9	7,7	7,7	100.00	6.9	21.50	0.39
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	2390,9	798,67	26,87	26,87	100.00	24.54	850.08	0.36
			Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	299	79,99	44	44	100.00	45.54	169.53	0.57
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	1621,9	625,68	220,77	208,24	94.32	211.6	1045.52	0.64
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor	195	49,99	26,3	26,27	99.89	24.75	101.01	0.52
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianyabahan bacaan dan peraturan perundang undangan	37,8	9,8	5,25	5,25	100.00	4.9	19.95	0.53
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan jamuan	226	54,2	32,16	32,15	99.97	34.3	120.65	0.53
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1037,5	237,34	134,75	134,31	99.67	123.77	495.42	0.48
			Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Upah Non PNS	2,390	798,34	411,84	401,08	97.39	407.80	1607.22	0.67
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	223	59,96	31,86	31,84	99.94	38.12	129.92	0.58

				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
				Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya Aula Gedung Kantor	4,910	597,19	-	-		597.19	0.12	
				pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedia Kendaraan Dinas / Operasional	2976,5	761,11	500	473,91	94.78	565.52	1800.54	0.60
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	376	130,93	-	-		79.21	210.14	0.56
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	479	112,68	91,2	90	98.68	49.51	252.19	0.53
				Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur	500	289,63	318,68	312,83	98.16	-	602.46	1.20
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	885	106,37	91,2	88,83	97.40	298.34	493.54	0.56
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebersihan pasar	Terawatnya kebersihan pasar	750	175,5	150	141,49	94.33	354.53	671.52	0.90

## II.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Secara umum jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja keuangan Tahun Anggaran 2019, maka pada Belanja Tidak Langsung pencapaian target anggaran pada Tahun Anggaran 2019 baru mencapai 90,26% terhitung sampai dengan 31 Desember 2019. Jadi masih jauh dari target yang sampai akhir bulan Desember sebesar 100 %. Realisasi anggaran belanja untuk Belanja Langsung baru mencapai 85,97%, dari target akhir sebesar 100%.

Belum optimalnya realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hambatan dan kendala yang terjadi pada lingkup teknis/ fisik kegiatan ikut mempengaruhi pencapaian target anggaran/ keuangan;
- b. Kekurang cermatan dalam penyusunan anggaran pada rekening kegiatan tertentu mengakibatkan pencapaian target anggaran/ keuangan kurang maksimal;
- c. Adanya beberapa jenis rekening yang sulit diprediksi, sehingga perhitungan anggaran untuk rekening tersebut sulit untuk tepat sesuai dengan kebutuhan/ realisasi;
- d. Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan pada akhir tahun serta penambahan anggaran di Perubahan APBD 2019 mengakibatkan kurang optimalnya capaian target kinerja keuangan pada kegiatan tersebut;
- e. Adanya beberapa kegiatan fisik yang dipihak ketigakan yang penurunan nilai kontraknya jauh dibawah pagu anggaran mengakibatkan pencapaian target anggaran/ keuangan kurang maksimal.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018(n-2)	Tahun 2019(n-1)	Tahun 2020(n)	Tahun 2021(n+1)	Tahun 2018(n-2)	Tahun 2019(n-1)	Tahun 2020(n)	Tahun 2021(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat di bidang industri, perdagangan, dan pengelolaan pasar	Terciptanya sistem kerja yang lebih baik yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas;	Terciptanya sistem kerja yang lebih baik yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas;	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	100	100		56-70	71-85	Sangat Berhasil
2	Peningkatan kelengkapan data/informasi dokumen perencanaan yaitu Renstra, Renja, RKA/DPA, LkjIP dan Profil PKL	Tersedianya data/informasi dan hasil penelitian yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara benar dan tepat	Tersedianya data/informasi dan hasil penelitian yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara benar dan tepat	6 dok	6 dok	6 dok	100	100		56-71	71-86	Sangat Berhasil
3	Jumlah permasalahan pengaduan konsumen yang bisa diatasi	Terwujudnya barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran yang aman, sehat, dan tidak kadaluwarsa serta terhindar dari barang palsu atau dipalsukan	Terwujudnya barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran yang aman, sehat, dan tidak kadaluwarsa serta terhindar dari barang palsu atau dipalsukan	100%			100	100		56-72	71-87	Sangat Berhasil
	Tercapainya keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen dalam mencukupi kebutuhan			26 Kec	26 kec	26 kec	100	100		56-73	71-88	Sangat Berhasil
	Pelaksanaan pengawasan tera ulang alat UUTP pada 26 Kecamatan di wilayah kabupaten Kebumen			26 Kec	26 kec	26 kec	100	100		56-74	71-89	Sangat Berhasil
	Pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasaran di wilayah Kabupaten Kebumen			26 Kec	26 kec	26 kec	100	100		56-75	71-90	Sangat Berhasil

4	Terlaksananya bantuan peralatan untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk bagi kelompok industri kecil dan menengah	Meningkatnya daya saing IKM yang berbasis sumber daya lokal baik pengolahan hasil pertanian maupun non pertanian melalui fasilitasi bagi IKM	Meningkatnya daya saing IKM yang berbasis sumber daya lokal baik pengolahan hasil pertanian maupun non pertanian melalui fasilitasi bagi IKM	5 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	100	100		56-76	71-91	Sangat Berhasil
	Terwujudnya kualitas dan mutu produk serta merek yang dikenal masyarakat luas			100%	100%	100%	100	100		56-77	71-92	Sangat Berhasil
5	Terlaksananya bantuan peralatan untuk meningkatkan pengetahuan/ketrampilan pengrajin industri kecil menengah	Meningkatnya daya saing industri dengan melakukan penerapan teknologi produksi sederhana dan mudah dikuasai untuk diversifikasi produk dan desain dalam membuat inovasi	Meningkatnya daya saing industri dengan melakukan penerapan teknologi produksi sederhana dan mudah dikuasai untuk diversifikasi produk dan desain dalam membuat inovasi	19 Kelompok	2 kelompok	2 kelompok	100	100		56-78	71-93	Sangat Berhasil
	Fasilitasi pembuatan izin usaha bagi industry kecil menengah			250	300	350	100	100		56-79	71-94	Sangat Berhasil
6	Pencapaian target pendapatan keuangan daerah melalui retribusi pelayanan pasar, retribusi kebersihan pasar, dan retribusi parkir	Tercapainya target pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan kebersihan pasar	Tercapainya target pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan kebersihan pasar	100%	100%	100%	100%	100		56-80	71-95	Sangat Berhasil
7	Pemantauan harga kepokmas dan ketersediannya di wilayah Kabupaten Kebumen	Terciptanya koordinasi dan sinnkronisasi dengan instansi/lembaga terkait dalam memperluas jaringan pemasaran, pengelolaan pasar daerah dan penataan pedagang kaki lima	Terciptanya koordinasi dan sinnkronisasi dengan instansi/lembaga terkait dalam memperluas jaringan pemasaran, pengelolaan pasar daerah dan penataan pedagang kaki lima	35 Pasar Daerah	35 Pasar Daerah	35 Pasar Daerah	35 Pasar Daerah	100		56-81	71-96	Sangat Berhasil
	Meluasnya jaringan pemasaran UMKM dengan mengikuti pameran tingkat nasional dan lokal			4 Pameran	7 Pameran	7 Pameran	8 Pameran	100		56-82	71-97	Sangat Berhasil
	Terwujudnya pasar daerah yang aman, nyaman, dan sehat melalui rehabilitasi/pembangunan pasar-pasar daerah			3Pasar	7 Pasar	10 Pasar	7 Pasar	100		56-83	71-98	Sangat Berhasil
	Terwujudnya kawasan pedagang kakilima yang lebih baik			4 lokasi	2Lokasi	2 Lokasi	2 lokasi	100		56-84	71-99	Sangat Berhasil

### II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Pengertian isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan program/kegiatan yang dapat mengantisipasi isu-isu strategis tersebut.

Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah industri, pengembangan perdagangan dan sarana perdagangan yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

#### 1. Bidang Perindustrian

Potensi sumber daya alam lokal yang belum sepenuhnya didayagunakan secara efisien dan optimal sebagai bahan baku industri, dan kondisi riil struktur industri di Kabupaten Kebumen yang masih dilaksanakan dalam skala kecil dan menengah dengan teknologi sederhana dan Sumber Daya Manusia yang relatif rendah menyebabkan beberapa jenis usaha belum siap bersaing dalam perdagangan bebas. Untuk itu perlu pengolahan bahan baku secara optimal sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis dan bisa lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan, melalui langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, yaitu :

- a. Pembinaan industri kecil dan menengah melalui pelatihan dan bantuan peralatan sarana produksi;
- b. Kemudahan pemberian ijin usaha bagi Industri Kecil Menengah;
- c. Fasilitasi HAKI/hak merek;
- d. Gugus kendali mutu;
- e. Monitoring dan evaluasi.

#### 2. Bidang Pengembangan Perdagangan

Globalisasi yang sedang kita hadapi mengakibatkan persaingan dagang barang dan jasa yang semakin bebas dan ketat. Untuk itu perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, yaitu :

- a. Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa hasil produk dan kebutuhan masyarakat;
- b. Meningkatkan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
- c. meningkatkan perdagangan produk unggulan Kabupaten Kebumen dengan memperluas jaringan bisnis dan promosi produk unggulan dengan cara mengikuti pameran tingkat nasional dan daerah;
- d. Pengawasan barang dan jasa yang beredar; Penyediaan informasi mengenai harga kepokmas;

- e. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri dan membangun jejaring dengan eksportir.

### 3. Bidang Sarana Perdagangan

Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan melalui program revitalisasi pasar-pasar daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan pasar yang diharapkan dapat merubah "wajah" pasar tradisional menjadi lebih higienis, nyaman dan teratur sehingga dapat bersaing dengan pasar modern, untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, yaitu:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan melalui program revitalisasi pasar-pasar daerah;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan pasar dan retribusi kebersihan pasar dan parkir;
- c. Pelayanan kebersihan pasar;

Untuk melengkapi dokumen ini perlu disampaikan penjabaran dari uraian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen yang selengkapny adalah sebagai berikut :

#### 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## 2. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang perindustrian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri;
- b. pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri;
- c. pemberian bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standarisasi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- d. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri;
- e. penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran industri;
- f. fasilitasi pemberian penghargaan bagi pelaku usaha industry berprestasi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan perdagangan dan distribusi barang, metrologi, pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Perdagangan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Pengawasan perdagangan dan distribusi barang;
- b. Metrologi;
- c. pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor;
- d. pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4. Bidang Sarana Perdagangan

Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Sarana Perdagangan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. pembangunan, penataan dan ketertiban pasar;
- b. pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar;
- c. pemantauan, pengawasan, penataan dan pengaturan sarana prasarana serta pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar;
- d. pengaturan keamanan, ketertiban pasar dan lingkungannya;
- e. pengelolaan pendapatan dan kebersihan pasar;
- f. pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan;
- g. pendataan, perencanaan, penerimaan, penagihan, penyeteroran dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- h. inventarisasi dan penyiapan bahan pembinaan serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta penanganan perizinan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. pelaksanaan pendataan, penetapan, perencanaan, penerimaan, penagihan, intensifikasi, ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan retribusi pasar daerah, serta pendapatan lain-lain sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan retribusi pasar, pengaturan ruko kios dan loos pasar;
- d. pengurusan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan hunian kios-kios, pengaturan sarana dan prasarana penghasil retribusi pasar;
- e. pembukuan, penyusunan laporan realisasi penerimaan retribusi pasar daerah dan pendapatan lain-lain;
- f. mengkoordinir kepala-kepala unit di masing-masing wilayah pasar sesuai wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan perencanaan, urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian dan tata laksana serta rumah tangga dan perlengkapan; dan pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### II.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Tema pembangunan daerah tahun 2021 adalah “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pertanian untuk Kesejahteraan Masyarakat”, dengan prioritas pembangunan antara lain :

1. Peningkatan perekonomian berbasis pertanian dan pariwisata
2. Penanggulangan kemiskinan berbasis potensi unggulan wilayah
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
4. Peningkatan kehidupan sosial dan keagamaan
5. Peningkatan penerapan *good and clear government*

Adapun review Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020, dapat dilihat dalam table 2.4. berikut:

Tabel 2.4.  
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018  
 KABUPATEN KEBUMEN  
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,782,540,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,779,540,000	
	a Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perindag	Meningkatnya pelayanan surat menyurat	12 bulan	4,000,000	a Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perindag	Meningkatnya pelayanan surat menyurat	12 bulan	4,000,000	
	b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perindag	Tercapainya pemanfaatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	462,000,000	b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perindag	Tercapainya pemanfaatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	462,000,000	
	c Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perindag	Tercapainya pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas	12 bulan	170,000,000	c Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perindag	Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	170,000,000	
	d Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Perindag	Tercapainya penatausahaan keuangan SKPD	22 orang	102,300,000	d Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Perindag	Tercapainya penatausahaan keuangan SKPD	12 bulan	102,300,000	
	e Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Perindag	Tercapainya kebersihan kantor	12 bulan	7,700,000	e Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Perindag	Tercapainya kebersihan kantor	12 bulan	7,700,000	
	f Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Perindag	Terpenuhiya perbaikan peralatan kantor	12 bulan	27,500,000	f Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Perindag	Tersedianya peralatan kerja yang baik	12 bulan	27,500,000	
	g Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Perindag	Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	44,000,000	g Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Perindag	Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	44,000,000	
	h Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perindag	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	346,940,000	h Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perindag	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	346,940,000	
	i Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dinas Perindag	Terpenuhiya penerangan kantor	12 bulan	27,500,000	i Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dinas Perindag	Terpenuhiya penerangan kantor	12 bulan	27,500,000	
	j Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perindag	Terpenuhiya bahan bacaan dan surat kabar	12 bulan	5,500,000	j Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perindag	Terpenuhiya bahan bacaan dan surat kabar	12 bulan	5,500,000	
	k Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perindag	Terpenuhiya kebutuhan makanan dan minuman untuk	12 bulan	33,000,000	k Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perindag	Terpenuhiya kebutuhan makanan dan minuman untuk	12 bulan	33,000,000	

			rapat dan tamu					rapat dan tamu						
	l	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perindag	Terselenggaranya perjalanan dinas ke luar daerah	12 bulan	137,500,000		l	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perindag	Terselenggaranya perjalanan dinas ke luar daerah	12 bulan	137,500,000	
	m	Penunjang administrasi perkantoran	Dinas Perindag	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan non PNS	12 bulan	381,600,000		m	Penunjang administrasi perkantoran	Dinas Perindag	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan non PNS	12 bulan	381,600,000	
	n	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dinas Perindag	Terselenggaranya perjalanan daerah ke dalam daerah	12 bulan	33,000,000		n	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dinas Perindag	Tersedianya perjalanan daerah ke dalam daerah	12 bulan	30,000,000	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				460,000,000			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				460,000,000	
	d	Pengadaan perlatan gedung kantor	Dinas Perindag	Terpenuhinya peralatan untuk gedung kantor	6 unit	20,000,000		d	Pengadaan perlatan gedung kantor	Dinas Perindag	Terpenuhinya peralatan untuk gedung kantor	6 unit	20,000,000	
	e	Pengadaan meubeleir	Dinas Perindag	Tersedianya meubelair	48 unit	200,000,000		e	Pengadaan meubeleir	Dinas Perindag	Tersedianya meubelair	48 unit	200,000,000	
	f	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perindag	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	90,000,000		f	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perindag	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	90,000,000	
	g	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebersihan pasar	Dinas Perindag	Terpeliharanya kebersihan pasar-pasar daerah	35 pasar	150,000,000		g	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebersihan pasar	Dinas Perindag	Terpeliharanya kebersihan pasar-pasar daerah	35 pasar	150,000,000	
3		Program Pengembangan Data/Informasi				75,000,000			Program Pengembangan Data/Informasi				75,000,000	
	a	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Dinas Perindag	Tersusunnya dokumen perencanaan Renja, RKA, DPA, LAKIP, Renstra, LKPJ LPPD	6 dokumen	75,000,000		a	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Dinas Perindag	Tersusunnya dokumen perencanaan Renja, RKA, DPA, LAKIP, Renstra, LKPJ LPPD	6 dokumen	75,000,000	
4		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				300,000,000			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				300,000,000	
	a	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Pasar Kutowinangun	Tersedianya fasilitas pengelolaan persampahan	4 Lokasi	300,000,000		a	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Pasar Kutowinangun	Tersedianya fasilitas pengelolaan persampahan	4 Lokasi	300,000,000	
5		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				500,000,000			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				500,000,000	
	a	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	35 Pasar daerah	Tercapainya target pendapatan keuangan daerah	4 Lokasi	400,000,000		a	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	35 Pasar daerah	Tercapainya target pendapatan keuangan daerah	4 Lokasi	400,000,000	
	b	Fasilitasi peningkatan PAD	4 UPTD	Terfasilitasinya peningkatan PAD	4 kelompok	100,000,000		b	Fasilitasi peningkatan PAD	4 UPTD	Terfasilitasinya peningkatan PAD	4 kelompok	100,000,000	
6		Program Penataan PeraturanPerundang-undangan				220,000,000			Program Penataan PeraturanPerundang-undangan				220,000,000	

	a	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan	Dinas Perindag	Tersosialisasinya peraturan perundang undangan	3 Perda	220,000,000	a	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan	Dinas Perindag	Tersosialisasinya peraturan perundang undangan	3 Perda	220,000,000	
7		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				35,000,000		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				35,000,000	
	a	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Dinas Perindag	Tersusunnya data Statistik	3 Dokumen	35,000,000	a	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Dinas Perindag	Tersusunnya data statistik	3 Dokumen	35,000,000	
8		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				925,000,000		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				925,000,000	
	a	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	26 Kecamatan di Kab. Kebumen	Terlaksananya pengawasan dan peredaran barang dan jasa	26 kecamatan	95,000,000	a	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	26 Kecamatan di Kab. Kebumen	Terlaksananya pengawasan dan peredaran barang dan jasa	96 kali	95,000,000	
	b	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	26 Kecamatan di Kab. Kebumen	Terlaksananya pengawasan tera ulang	26 kecamatan	780,000,000	b	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	26 Kecamatan di Kab. Kebumen	Terlaksananya pengawasan tera ulang	26 kecamatan	780,000,000	
	c	Pengumpulan informasi pita cukai ilegal atau tidak dilekati pita cukai	26 Kecamatan di Kab. Kebumen	terlaksananya bantuan peralatan dan pelatihan bagi ikm	26 kecamatan	50,000,000	c	Pengumpulan informasi pita cukai ilegal atau tidak dilekati pita cukai	26 Kecamatan di Kab. Kebumen	terlaksananya bantuan peralatan dan pelatihan bagi ikm	26 kecamatan	50,000,000	Program kegiatan sumber dana DBHCHT
9		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				20,677,720,000		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				20,677,720,000	
	a	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	sruweng, kebumen, pejagoaan, karanganyar dan sempor	Terfasilitasinya pengurusan dokumen ekspor bagi ikm	5 IKM	60,000,000	a	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	sruweng, kebumen, pejagoaan, karanganyar dan sempor	Terfasilitasinya pengurusan dokumen ekspor bagi ikm	5 IKM	60,000,000	
	b	Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk	Pasar daerah	Terpenuhinya data informasi harga kebutuhan bahan pokok masyarakat	26 kecamatan	75,000,000	b	Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk	Pasar daerah	Terpenuhinya data informasi harga kebutuhan bahan pokok masyarakat	26 kecamatan	75,000,000	
	c	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Dinas Perindag	Terlaksananya pameran produk unggulan tingkat daerah dan nasional	3 kali	200,000,000	c	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Dinas Perindag	Terlaksananya pameran produk unggulan tingkat daerah dan nasional	3 kali	200,000,000	
	d	Pemeliharaan/rehabilitasi pasar-pasar daerah	Dinas Perindag	Terwujudnya pasar daerah yang aman dan nyaman	3 lokasi pasar	14,185,000,000	d	Pemeliharaan/rehabilitasi pasar-pasar daerah	Dinas Perindag	Terwujudnya pasar daerah yang aman dan nyaman	3 lokasi pasar	14,185,000,000	
	e	Pemeliharaan/rehabilitasi pasar-pasar daerah (DAK)	Dinas Perindag	Terwujudnya pasar daerah yang aman dan nyaman	1 lokasi pasar	3,365,000,000	e	Pemeliharaan/rehabilitasi pasar-pasar daerah (DAK)	Dinas Perindag	Terwujudnya pasar daerah yang aman dan nyaman	1 lokasi pasar	3,365,000,000	

	f	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Dinas Perindag	Tersedianya dana untuk upah tenaga kebersihan dan keamanan pasar	208 orang	2,592,720,000	f	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Dinas Perindag	Tersedianya dana untuk upah tenaga kebersihan dan keamanan pasar	208 orang	2,592,720,000
	g	Pengembangan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang (SRG)	Kec. Rowokele	Terlaksananya pengelolaan gudang sistem resi gudang (SRG) di Kabupaten Kebumen	40 ton	200,000,000	g	Pengembangan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang (SRG)	Kec. Rowokele	Terlaksananya pengelolaan gudang sistem resi gudang (SRG) di Kabupaten Kebumen	40 ton	200,000,000
10		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekpor				250,000,000		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekpor				250,000,000
	a	Pengembangan Informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Dinas Perindag	terlaksananya pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	2 kali	100,000,000	a	Pengembangan Informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Dinas Perindag	terlaksananya pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	2 kali	100,000,000
	b	Membangun Jejaring dengan ekportir	Dinas Perindag	Terbangunnya jejaring dengan ekportir	2 kali	150,000,000	b	Membangun Jejaring dengan ekportir	Dinas Perindag	Terbangunnya jejaring dengan ekportir	2 kali	150,000,000
11		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				2,085,000,000		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				2,085,000,000
	a	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Wonoharjo, Giripurno, Ginandong, Karanggadung, karanggayam, Karangsambung, Rejosari, Jatimalang dan Kelapagada	Terlaksananya fasilitasi bagi IKM terhadap sumber daya	4 kelompok	400,000,000	a	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Wonoharjo, Giripurno, Ginandong, Karanggadung, karanggayam, Karangsamung, Rejosari, Jatimalang dan Kelapagada	Terlaksananya fasilitasi bagi IKM terhadap sumber daya	4 kelompok	400,000,000
	b	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Padureso, karanggayam, penimbun, clapar, Karangtengah, Logando	terlaksananya bantuan alat dan pelatihan bagi ikm	5 Kelompok, 6 paket	985,000,000	b	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Padureso, karanggayam, penimbun, clapar, Karangtengah, Logando	terlaksananya bantuan alat dan pelatihan bagi ikm	5 Kelompok, 6 paket	985,000,000
	c	Pembinaan kemampuan dan	26	Terlaksananya	7 Pelatihan		c	Pembinaan kemampuan dan	26	Terlaksananya	7 Pelatihan	

	<p>ketramampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT (DBHCHT)</p> <p>d Pemberian kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah</p>	<p>Kecamatan di Kab. Kebumen</p> <p>26 Kecamatan di Kab. Kebumen</p>	<p>bantuan alat dan pelatihan bagi ikm</p> <p>Tercapainya ijin PIRT bagi IKM, MD/BPOM dan sertifikasi</p>	<p>dan 1 bantuan alat</p> <p>225 IKM</p>	<p>500,000,000</p> <p>200,000,000</p>	<p>ketramampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT (DBHCHT)</p> <p>d Pemberian kemudahan ijin usaha bagi IKM</p>	<p>Kecamatan di Kab. Kebumen</p> <p>26 Kecamatan di Kab. Kebumen</p>	<p>bantuan alat dan pelatihan bagi ikm</p> <p>Tercapainya ijin PIRT bagi IKM, MD/BPOM dan sertifikasi</p>	<p>dan 1 bantuan alat</p> <p>225 IKM</p>	<p>500,000,000</p> <p>200,000,000</p>	
12	<p>Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi</p> <p>a Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas</p>	<p>Sempor, Karanganyar, Rowokele, dan 10 Kecamatan Lainnya</p>	<p>Terwujudnya peningkatan dan penyelenggaraannya sertifikasi hak merk dan hak kekayaan intelektual lainnya (hki)</p>	<p>20 ikm</p>	<p>50,000,000</p>	<p>Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi</p> <p>a Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas</p>	<p>Sempor, Karanganyar, Rowokele, dan 10 Kecamatan Lainnya</p>	<p>Terwujudnya peningkatan dan penyelenggaraannya sertifikasi hak merk dan hak kekayaan intelektual lainnya (hki)</p>	<p>20 ikm</p>	<p>50,000,000</p>	
13	<p>Program Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan</p> <p>a Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan</p> <p>b Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan Asongan</p> <p>c Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi PKL dan Asongan</p> <p>d Kegiatan Pengawasan mutu dagangan PKL dan Asongan</p>	<p>ayah,,Petanahan Karanganyar dan Kutowinangun Kebumen, Gombang Sruweng, Sempor, Prembun</p>	<p>terfasilitasinya PKL dan Pembinaan PKL dan Penyuluhan PKL dan Asongan</p> <p>Terfasilitasinya tempat PKL dan Asongan</p> <p>Terfasilitasinya Pengawasan PKL dan Asongan</p>	<p>2 kec</p> <p>2 kec</p> <p>2 kec</p> <p>3 Kec</p>	<p>880,000,000</p> <p>100,000,000</p> <p>260,000,000</p> <p>200,000,000</p> <p>320,000,000</p>	<p>Program Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan</p> <p>a Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan</p> <p>b Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan Asongan</p> <p>c Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi PKL dan Asongan</p> <p>d Kegiatan Pengawasan mutu dagangan PKL dan Asongan</p>	<p>ayah,,Petanahan Karanganyar dan Kutowinangun Kebumen, Gombang Sruweng, Sempor, Prembun</p>	<p>terfasilitasinya PKL dan Pembinaan PKL dan Penyuluhan PKL dan Asongan</p> <p>Terfasilitasinya tempat PKL dan Asongan</p> <p>Terfasilitasinya Pengawasan PKL dan Asongan</p>	<p>2 kec</p> <p>2 kec</p> <p>2 kec</p> <p>3 Kec</p>	<p>880,000,000</p> <p>100,000,000</p> <p>260,000,000</p> <p>200,000,000</p> <p>320,000,000</p>	
14	<p>Program Penataan struktur industri</p> <p>a Penyusunan rencana induk industri daerah</p>	<p>Dinas perindag</p>	<p>Tersusunnya dokumen rencana induk daerah kab, Kebumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>100,000,000</p> <p>100,000,000</p>	<p>Program Penataan struktur industri</p> <p>a Penyusunan rencana induk industri daerah</p>	<p>Dinas perindag</p>	<p>Tersusunnya dokumen rencana induk daerah kab, Kebumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>100,000,000</p> <p>100,000,000</p>	
<b>J U M L A H</b>					<b>28,340,260,000</b>					<b>28,337,260,000</b>	

Sumber : Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2018

## II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kebumen membuka akses yang luas kepada masyarakat dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya melalui mekanisme musrenbang. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan yang sudah dilaksanakan pada awal tahun 2019, Usulan Musrenbangcam, Kuota Kecamatan dan Pokir DPRD yang masuk ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2021 tidak terdapat usulan kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

BAB III  
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KEBUMEN

III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dan Visi Bupati Kebumen terpilih Tahun 2016 - 2021. Adapun Visi Kabupaten Kebumen 2005-2025 tersebut adalah “Kebumen Mandiri Sejahtera Berbasis Agrobisnis”, sedangkan Visi Bupati terpilih Tahun 2016 - 2021 adalah “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”. Sedangkan sesuai misi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen menjabarkan misi ke tiga yaitu :

Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industry dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

Perkembangan situasi nasional menuntut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen untuk terus melakukan pengembangan/pembaharuan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga dapat beroperasi secara lebih efektif, efisien dan ekonomis serta memiliki akuntabilitas. Program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, antara lain:

1. Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan
2. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3. Program Pengembangan Ekspor
4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
6. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan.

Perkembangan inilah yang membawa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen harus menjadi salah satu institusi penggerak perekonomian rakyat yang responsif, antisipatif, handal dan mampu mempercepat mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan nasional yang terkait dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.

### III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Keterkaitan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

Visi pembangunan Kabupaten Kebumen (Bupati Terpilih) Tahun 2016-2021 adalah :

“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, *Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan*”.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 serta harus memperhatikan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen yang tertuang melalui indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam pelaksanaan RPJMD adalah mendukung misi/agenda ke-6 Bupati terpilih tahun 2016-2021. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, rencana kerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan untuk mengevaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021, seharusnya didasarkan atas Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan atas dasar isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen. Adapun tujuan dan sasaran dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten kebumen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.1

#### Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
1	Meningkatkan sistem kerja yang professional dan didukung oleh sarana dan prasarana serta SDM yang	Meningkatnya sistem kerja yang lebih baik dengan didukung oleh tertib administrasi dan SDM yang berkualitas	Jumlah pegawai yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi dalam bidang administrasi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi	12 bulan

	berkualitas	Meningkatnya pelayanan publik yang didukung oleh sarana dan prasarana kantor yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang memadai guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	12 Unit
2	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan	Tersedianya dokumen perencanaan yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan	Jumlah dokumen perencanaan berkualitas yang dapat disusun	7 dokumen
	pengumpulan data base industri, perdagangan, dan pengelolaan pasar	Tersedianya database industri, perdagangan dan pasar yang mutakhir	Jumlah data base industri, perdagangan, dan pasar yang mutakhir dan berkualitas	1 Dokumen
3	Pembuatan Kawasan Industri di Kabupaten Kebumen	Fasilitasi terhadap industri besar yang akan membuka usahanya di Kabupaten Kebumen	Terbentuknya kawasan industri di Kabupaten Kebumen	1 Unit
4	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen	Tercapainya pengembangan industri gula kelapa menjadi industri gula semut pada sentra gula kelapa di sekitar pantai selatan	Bertambahnya jumlah industri gula semut yang menghasilkan produk sesuai standar ekspor	2 IKM
		Berkembangnya industri kecil dan menengah yang memiliki struktur industri yang kuat dengan kinerja yang efisien dan kompetitif di Kabupaten Kebumen	Jumlah IKM dengan produk yang mempunyai daya saing tinggi melalui peningkatan kemampuan kewirausahaan, ketersediaan bahan baku, dan tersedianya tenaga kerja yang berkualitas	27 Kegiatan
5	Pengembangan usaha melalui informasi perdagangan dan pengelolaan hasil pertanian	Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/lembaga terkait dalam memperluas jaringan pemasaran dan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang	Jumlah pameran produk unggulan daerah yang diikuti dan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang	11 Kali
		Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan penting masyarakat	Jumlah pantauan/monitoring ketersediaan, harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat	26 Kec
6	Terciptanya Penataan, penertiban, pembinaan dan	Terwujudnya PKL yang tertib bersih, maju, mandiri di Kabupaten Kebumen	Meningkatnya PKL yang tertib, bersih, maju, berkembang dan mandiri	6 Lokasi

	pemberdayaan PKL dan sejenisnya			
7	Terwujudnya keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen	Terwujudnya barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran yang aman, sehat, dan tidak kadaluwarsa serta terhindar dari barang palsu atau dipalsukan	Jumlah barang dan jasa di pasaran yang tidak memenuhi syarat/standar	26 Kec
		Terpenuhinya hak-hak konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen	Jumlah Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha	26 Kec
		Terwujudnya tertib niaga, tertib ukur, takar, timbng, dan perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang legal	26 Kec
		Peningkatan pengetahuan pelaku usaha dalam memahami peraturan di bidang cukai	jumlah pengawasan rokok dengan pita cukai ilegal	26 Kec
8	Meningkatnya target pendapatan asli daerah	Tercapainya target pendapatan daerah di pasar-pasar daerah	Tercapainya target retribusi pelayanan pasar, retribusi kebersihan pasar, retribusi parkir di 4 UPTD Pasar Daerah	4 UPTD
9	Tersusunnya Perda tentang pengelolaan pasar daerah	Tersusunnya Perda tentang pengelolaan pasar-pasar daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Perda tentang pasar daerah yang akan tersusun	2 Dokumen
10	Mendukung peningkatan pelayanan pada masyarakat di bidang penyediaan dan pengaturan fasilitasi perdagangan	Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan pasar daerah melalui pengelolaan persampahan	Jumlah pasar daerah yang bersih	4 UPTD
		Tersedianya petugas untuk kebersihan dan keamanan pasar	Jumlah petugas kebersihan dan kewanaman pasar daerah	
11	Pengembangan usaha melalui informasi perdagangan dan pengelolaan hasil pertanian	Terlaksanannya pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Jumlah pameran perdagangan luar negeri	1 Kali
12	Meningkatkan pertumbuhan ekonomidaerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatkan kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Prosentase pasar tradisional dalam kondisi baik	77,78%

Dalam Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 telah menetapkan rencana program dan kegiatan sebanyak 8 (delapan) program dengan 11 (sebelas) Kegiatan dan 34 (tigapuluh empat) sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu waktu 1 (satu) tahun dan telah disetujui dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, adapun program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Program, kegiatan dan sub kegiatan  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen  
Tahun 2021

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan	1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
				2	Fasilitasi Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
		2	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3	Pembinaan dan Penendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
				4	Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5	Koordinasi dan Singkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
				4	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3	Pengembangan Ekspor	5	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	7	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
4	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	6	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	8	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/kota
5	Perencanaan dan Pembangunan Industri	7	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota	9	Koordinasi dan Singkronisasi Penyusunan Kebijakan Dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
				10	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
				11	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
				12	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
6	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	8	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	13	Koordinasi dan Singkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri
7	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	9	Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI,IPUI, IUKI, IPKI Kabupaten/Kota	14	Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
8	Penunjang Urusan Pemerintahan	9	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
				16	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		10	Administrasi Keuangan	17	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
		11	Administrasi Umum	18	Penyediaan jasa surat menyurat

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
				19	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
				20	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor
				21	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
				22	Penyediaan jasa administrasi keuangan
				23	Penyediaan jasa kebersihan kantor
				24	Penyediaan alat tulis kantor
				25	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
				26	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				27	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
				28	Penyediaan makanan dan minuman
				29	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah
				30	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional
				31	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
				32	Pengadaan peralatan gedung kantor
				33	Pengadaan Mebeleur
				34	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

#### BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pada dasarnya kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Secara lebih lengkap mengenai Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 dapat dilihat dalam table 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022  
KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA**

Nomor	Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan				
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu	Prakiraan	Sumber	Prioritas	
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Indikatif (Rp)	Maju (Rp)	Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN												28.906.898.000	31.080.000.000		
3.2.06.01	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												18.379.403.000	20.665.000.000		
3.30.2.06.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												15.728.992.000	17.890.000.000		
3.30.2.06.01.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												14.943.408.000	16.470.000.000		
							Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	100%								
							Banyaknya lokasi PKL dan asongan yang tertata	2 Lokasi								
3.30.2.06.01.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								Jumlah UPTD Pasar, Pedagang Kaki lima yang terbangun dan Sarpras Kebersihan	4 UPTD Pasar			13.833.543.000	15.000.000.000		
3.30.2.06.01.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2	2	3	1. Pasar Petanahan Kec. Petanahan						Jumlah Lokasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Pasar Daerah	8 Lokasi	2.503.988.000	12.000.000.000	DAU	P1
					2. Pasar Kutowinangun Kec. Kutowinangun											
					3. Pasar Ambal Kec. Ambal											
					4. RPHU Gombang											
					5. UPTD Pasar Wilayah I											
					6. UPTD Pasar Wilayah II											
					7. UPTD Pasar Wilayah III											
					8. UPTD Pasar Wilayah IV											
3.30.2.06.01.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	3	1	Pasar Karangsari kec. Buayan Prembun dan Pasar Dorowati Kec. Klirong						Jumlah lokasi pasar yang terbangun dalam kondisi	2 Lokasi	9.500.000.000	0	DAU	P2

RANCANGAN AKHIR

Printed by SIMPER at 15-06-2020 09:53:03 WIB

Nomor	Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.30.2.06.01.03. 2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	2	4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah lokasi terlaksananya kegiatan operasional ,penyediaan peralatan/sa rana kebersihan	4 UPTD	1.829.555.000	3.000.000.000	DAU	P1
3.30.2.06.01.03. 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya							jumlah lokasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 lokasi ( UPTD Pasar dan PKL)			1.109.865.000	1.470.000.000		
3.30.2.06.01.03. 2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2	1	3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah Terlaksananya UPTD Pasar Intensifikasi/Ekste nsifikasi asi Pemungutan Retribusi Pasar	4 UPTD	708.680.000	970.000.000	DAU	P1
3.30.2.06.01.03. 2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2	1	3	4 UPTD Pasar WILAYAH I, II, III, IV dan SRG					Jumlah Pembentukan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Meningkatkan Disiplin Pedagang Kaki Lima serta operasional pengelolaan Sistem Resi Gudang dan berfungsinya gudang untuk penyimpanan komoditas (Gabah) oleh masvarakat.	5 Lokasi	401.185.000	500.000.000	DAU	P1
3.30.2.06.01.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					Banyaknya pelaku usaha perdagangan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang kena cukai yang	4 Kegiatan					253.548.000	470.000.000		

Nomor	Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.30.2.06.01.04. 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							Jumlah Peredaran Barang dan Jasa, Ketentuan/T ata Niaga Perdagangan Barang Bersubsidi dan Barang Berbahaya serta Barang Kena Cukai (BKC) .	26 Kecamatan			210.050.000	350.000.000		
3.30.2.06.01.04. 2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	1	3	26 Kecamatan					Jumlah Pengawasan Barang Subsidi (LPG, Pupuk, Bahan Bakar Minyak) dan Barang Kena	26 Kec	210.050.000	350.000.000	DBH,DAU	P1
3.30.2.06.01.04. 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota							Jumlah Pasar milik Pemda yang terpantau harga dan stok kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting.	4 UPTD			43.498.000	120.000.000		
3.30.2.06.01.04. 2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	1	1	3	UPTD Pasar Wilayah I, II, III, IV					Jumlah Terpantaunya Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Ketersediaan Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat	4 UPTD	43.498.000	120.000.000	DAU	P1
3.30.2.06.01.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					Terlaksananya pengembang an ekspor	22 %					192.036.000	400.000.000		
3.30.2.06.01.05. 2.01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							Pengembangan informasi peluang pasar luar negeri dan terciptanya ekspertir	1 kali pameran			192.036.000	400.000.000		

Nomor	Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.30.2.06.01.05. 2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	2	1	3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah kegiatan Pengembangan Informasi Peluang Pasar Luar negeri dan Terciptanya Ekportir (Pameran Trade Expo)	1 Kegiatan	192.036.000	400.000.000	DAU	P1
3.30.2.06.01.07	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>					<b>Meningkatnya Pemasaran Produk dalam Negeri</b>	<b>2 Lokasi</b>					<b>340.000.000</b>	<b>550.000.000</b>		
						<b>Presentase Pasar Tradisional Dalam Kondisi Baik</b>	<b>100 %</b>								
3.30.2.06.01.07. 2.01	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>							<b>Tewujudnya peningkatan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>4 kegiatan pameran dan 1 Pembinaan</b>			<b>340.000.000</b>	<b>550.000.000</b>		
3.30.2.06.01.07. 2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	1	1	3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah kegiatan Pameran/ Pemasaran Produk Unggulan Daerah Jakarta (inacraft) Jateng (Jateng Fair) Kebumen ( Kebumen expo, PWK,) serta pembinaan pelaku usaha	5 Kegiatan	340.000.000	550.000.000	DAU	P1
3.31.2.06.01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>											<b>2.650.411.000</b>	<b>2.775.000.000</b>		
3.31.2.06.01.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>					<b>Terbentuknya Kawasan Industri</b>	<b>100%</b>					<b>2.435.411.000</b>	<b>2.225.000.000</b>		
3.31.2.06.01.02. 2.01	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>							<b>Terlaksananya Koordinasi Persiapan Pembangunan Kawasan Industri</b>	<b>20 %</b>			<b>2.435.411.000</b>	<b>2.225.000.000</b>		
3.31.2.06.01.02. 2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	2	1	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah Lokasi Koordinasi ,persiapan pembangunan Kawasan Industri	1 Lokasi	45.000.000	75.000.000	DAU	P1

Nomor	Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.31.2.06.01.02. 2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	1	1	3	Kabupaten Kebumen					Jumlah IKM terdampingi	1 Kelompok	510.000.000	650.000.000	DBH,DAU	P1
										Jumlah IKM yang dilatih peninffkatan SDM dalam bidang	185 Orang				
3.31.2.06.01.02. 2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2	1	3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah paket Pembinaan, Pelatihan dan Bantuan Alat Bagi IKM	1 Paket	1.430.266.000	650.000.000	DAU,DAK Fisik	P1
3.31.2.06.01.02. 2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	1	3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					jumlah pelaku IKM yang mndapat pelatihan	80 Orang	450.145.000	850.000.000	DAU	P1
										Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pendampingan	2 Kelompok				
3.31.2.06.01.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA</b>					Meningkatnya jumlah IKM yang menerapkan merek bagi produknya	35 IKM					145.000.000	350.000.000		
						Jumlah IKM yang produknya berstandar SNI	70 IKM								
						Jumlah wilayah/lokasi yang menerapkan	10 IKM								
3.31.2.06.01.03. 2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah</b>							Meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang berijin	100 IKM			145.000.000	350.000.000		
3.31.2.06.01.03. 2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	2	1	3	Kabupaten Kebumen					Jumlah terfasilitasi SP-PIRT, Halal Sertifikasi Halal, Fasilitasi Hak kekayaan intelektual, dan Fasilitasi Uji Nutrisi	100 Orang	145.000.000	350.000.000	DAU	P1

Nomor	Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan				
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu	Prakiraan	Sumber	Prioritas	
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Indikatif (Rp)	Maju (Rp)	Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
3.31.2.06.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					Kenaikan jumlah industri kecil menengah	54.959 unit						70.000.000	200.000.000		
3.31.2.06.01.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota							Terlaksananya update data IKM	50 %				70.000.000	200.000.000		
3.31.2.06.01.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1	3	3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional	1 Kegiatan	70.000.000	200.000.000	DAU	P1	
X.2.06.01												10.527.495.000	10.415.000.000			
X.XX.2.06.01												10.527.495.000	10.415.000.000			
X.XX.2.06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	15%						10.527.495.000	10.415.000.000		
						Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur	15%									
						Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah	159 Dokumen									
X.XX.2.06.01.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 sub kegiatan			85.000.000	145.000.000			

Nomor	Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.2.06.01.01 .2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	5	4	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, LKJIP, Tapkin, LKPJ/ LPPD, Evaluasi Renja Renstra dan THH	10 Dokumen	50.000.000	85.000.000	DAU	P1
X.XX.2.06.01.01 .2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	4	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah Dokumen data pedagang pasar dan aset	2 Dokumen	35.000.000	60.000.000	DAU	P1
<b>X.XX.2.06.01.01 .2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>							<b>Jumlah sub kegiatan administrasi keuangan</b>	<b>1 sub kegiatan</b>			<b>8.237.800.000</b>	<b>7.200.000.000</b>		
X.XX.2.06.01.01 .2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3	1	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan Untuk	12 Bulan	8.237.800.000	7.200.000.000	PAD,DAU	P1
<b>X.XX.2.06.01.01 .2.03</b>	<b>Administrasi Umum</b>							<b>Jumlah paket kegiatan administrasi</b>	<b>16 paket</b>			<b>2.204.695.000</b>	<b>3.070.000.000</b>		
X.XX.2.06.01.01 .2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	4	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah bulan Pelayanan Surat Menyurat	12 Bulan	4.995.000	6.000.000	DAU	P1
X.XX.2.06.01.01 .2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5	1	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Bulan	400.000.000	450.000.000	DAU	P1
X.XX.2.06.01.01 .2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	4	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah bulan Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	37.000.000	55.000.000	DAU	P1
X.XX.2.06.01.01 .2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5	4	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah bulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 Bulan	242.000.000	300.000.000	DAU	P1
X.XX.2.06.01.01 .2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5	4	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					jumlah Tersedianya Penatausahaan Organisasi Perangkat Daerah	11 Bulan	115.000.000	210.000.000	DAU	P1
X.XX.2.06.01.01 .2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5	4	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah bulan Kebersihan Kantor	12 Bulan	17.000.000	13.000.000	DAU	P1
X.XX.2.06.01.01 .2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5	4	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah bulanKebutuhan Alat tulis	12 Bulan	54.600.000	90.000.000	DAU	P1

RANCANGAN AKHIR

Printed by SIMPER at 15-06-202009:53:03 WIB

Nomor	Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.2.06.01.01 .2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5	4	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ,					Jumlah bulan Karcis Pasar, Karcis Parkir, Karcis Parkir dan Bener	12 Bulan	150.000.000	250.000.000	DAU	P1
X.XX.2.06.01.01 .2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	4	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ,					Jumlah bulan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Bulan	20.000.000	35.000.000	DAU	P1
X.XX.2.06.01.01 .2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5	4	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah bulan Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	12 Bulan	3.500.000	6.000.000	DAU	P1
X.XX.2.06.01.01 .2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	5	4	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ,					Jumlah bulan Kebutuhan Makan dan Minum Untuk Rapat dan Tamu	12 Bulan	24.500.000	40.000.000	DAU	P1
X.XX.2.06.01.01 .2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	5	4	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ,					Jumlah bulan Koordinasi Ke Pusat, Provinsi, dan Menghadiri Undangan Luar Daerah	12 Bulan	96.000.000	165.000.000	DAU	P1
X.XX.2.06.01.01 .2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5	3	5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	525.000.000	550.000.000	DAU	P1
X.XX.2.06.01.01 .2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5	4	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ,					Jumlah unit Perlengkapan Gedung Kantor, AC, Gorden, Pemotong Rumput	20 Unit	140.000.000	200.000.000	DAU	P1
X.XX.2.06.01.01 .2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5	4	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ,					Jumlah unit Sarana Kerja (laptop 18,Printer 18,LCD Proyektor 2, Camera 2, CCTV	41 Unit	125.000.000	350.000.000	DAU	P1
X.XX.2.06.01.01 .2.03.25	Pengadaan Mebeleur	5	4	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					Jumlah unit Mebelair untuk UPTD Metrologi	81 Unit	56.000.000	80.000.000	DAU	P1
X.XX.2.06.01.01 .2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	4	3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ,					Jumlah unit Gedung Kantor, Dekranasda,Gedu ng SRG, dan UPT Metrologi	4 Unit	194.100.000	270.000.000	DAU	P1
<b>JUMLAH AKHIR (Rp)</b>												<b>28.906.898.000</b>	<b>31.080.000.000</b>		

RANCANGAN AKHIR

Printed by SIMPER at 15-06-2020 09:53:03 WIB

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk mengkoordinasikan dan memberikan arah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang berisi tentang rencana pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2021 pada Organisasi Perangkat Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan tujuannya penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 mengacu pada usulan dari Desa/Kecamatan, prioritas kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, dan pagu indikatif. Secara keseluruhan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2021 akan dibiayai dengan pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 28.906.898.000,- (Dua puluh delapan milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Kebumen, anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan 8 (delapan) program yang dijabarkan kedalam 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiapuluh empat) sub kegiatan.

Keberhasilan pembangunan industri dan perdagangan, maupun pembangunan ekonomi secara keseluruhan khususnya ekonomi kerakyatan merupakan prioritas yang sangat vital dalam mempercepat pembangunan daerah dan memperkuat ketahanan ekonomi di Kabupaten Kebumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2021.

KEPALA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KEBUMEN



**WIDIATMOKO, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19681128 199603 1 006

# LAMPIRAN - LAMPIRAN